

DAFTAR BACAAN

BUKU-BUKU

- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press, 1986;
- H.Bagindo Sariduddin., M. Yamin Jinca, M. Said Nisar, *Seminar Mobilisasi Tertib
Pertanahan Dalam PJP II*, Kantor Wilayah B.P.N. Sulawesi Selatan: 1996;
- Yamin Lubis, & Abd. Rahim Lubis. *Hukum Pendaftaran Tanah Edisi Revisi*, Cet
II; Bandung: CV. Mandar Maju, 2003;
- Ali Achmad Chomzah, *Hukum Pertanahan Seri Hukum Pertanahan III –
Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah dan Seri Hukum Pertanahan IV –
Pengadaan Tanah Instansi Pemerintah*, Jakarta : Prestasi Pustaka, 2003;
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana. Jakarta, 2005;
- Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan
Pertama, Malang Bayu Media, 2005;
- Peter Mahmud Marzuki , *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana, 2007;
- Mhd. Yamin Lubis dan Abd. Rahim Lubis, *Hukum Pendaftaran Tanah*,
Mandar Maju, 2008;
- M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan,
Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009;
- Muchsin, Imam Koewahyono, Solihin, *Hukum Agraria Indonesia Dalam
Perspektif Sejarah*, Bandung, Refika Aditama, 2010;
- Ana Silviana, *Teori Dan Praktek Pendaftaran Tanah*, Semarang : Badan Penerbit
Universitas Diponegoro, 2010;

Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta, Sinar Grafika;

Bambang Sugeng A. S. dan Sujayadi, *Hukum Acara Perdata dan Dokumen Litigasi Perkara Perdata*, Jakarta, Kencana, 2011;

Urip Santoso, *Hukum Agraria*, Jakarta, Kencana Predana Media Group, 2012;

Adrian Sutedi, *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*, Jakarta; Sinar Grafika, 2013;

Mariam Badrul Zaman dikutip oleh Elza Syarief, *Pensertifikatan Tanah Bekas Hak Eigendom*, Kepustakaan Populer Gramedia, Jakarta, 2014;

JURNAL

Mudakir Iskandar Syah, 2004, "Sertifikat Tanah Ganda Akibat Lemahnya Data Base Pertanahan", *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara-Fakultas Hukum Universitas Suryadarma*, vol. 4, Nomor. 2;

Iwan Permadi, 2016, "Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Tanah Bersertifikat Ganda Dengan Cara Itikad Baik Demi Kepastian Hukum", *Yustisia*, vol. 5, Nomor. 2;

Darwis A. Natami, 2017, *Tanggung Jawab Siapa, Bila Terjadi Sertifikat Ganda Atas Sebidang Tanah*, *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, vol. 12, Nomor. 1;

Agus Salim, 2019, "Penyelesaian Sengketa Hukum Terhadap Pemegang Sertifikat Hak Milik Dengan Adanya Penerbitan Sertifikat Ganda", *Jurnal USM Law Office Review*, vol. 2, Nomor. 2;

Nurul Mahmudah, 2019, *Aspek Sosiologos Dalam Putusan Pengadilan Pada Perkara Cerai Gugat*, Nizham, Volume. 7, Nomor. 1;

Prasetyo Aryo Dewandaru, Nanik Tri Hastuti, Fifiana Wisnaeni, 2020, *Penyelesaian Sengketa Terhadap Sertifikat Ganda Di Badan Pertanahan Nasional*, Notarius, Vol. 13, no. 1;

Bhim Parkoso, 2021, *Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Sebagai Dasar Perubahan Sistem Publikasi Pendaftaran Tanah*, Journal of Private and Economic Law;

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Tambahan Lembaga Negara Nomor 2043;

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696;

Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 Tentang Badan Petanahan Nasional. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 21;

Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Penanganan Sengketa Pertanahan;

PUTUSAN PENGADILAN

Putusan Nomor : 02/PDT.G/2013/PN.ADL, Putusan Nomor : 09/Pdt/2015/PT.KDI, Putusan Nomor : 290 K/Pdt/2016

SKRIPSI/TESIS/DISERTASI

Dyah Sulistiyowati, Tesis, *Penyelesaian Sengketa Tanah Akibat Sertipikat Ganda Di Kelurahan Mangunharjo Kecamatan Tembalang, (Studi Kasus Berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No. 24/G/Tun/1998/Ptun.Smg Dan Putusan Pengadilan Negeri No. 34/Pdt.G/2007/Pn.Smg)*, Program Studi Magister Kenotariatan, Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang;

Jusriono Parulian Siregar, Tesis, “*Analisis Yuridis Pembatalan Sertifikat Ganda Pada Kantor Pertanahan Kota Medan (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 381 K/Tun/2017)*”, Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum-Universitas Sumatera Utara, 2018;

